

BAB V

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa Uni Eropa (UE) menerapkan praktik *selective humanitarianism* dalam respons bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi Ukraina dan Palestina pada periode 2022–2024. Dengan menggunakan teori konstruktivisme Alexander Wendt dan kerangka konseptual *selective humanitarianism* Didier Fassin, penelitian ini memadukan analisis wacana kritis Fairclough, *Discourse Historical Approach* (Wodak), dan *Socio-Cognitive Approach* (van Dijk). Analisis difokuskan pada dokumen kebijakan, pidato pejabat UE, serta representasi media untuk mengungkap hubungan antara kepentingan strategis, konstruksi identitas, dan legitimasi wacana. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mendeskripsikan perbedaan respons, tetapi juga menelusuri faktor penyebab dari praktik selektivitas tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pemahaman komprehensif tentang interaksi politik, identitas, dan diskursus dalam kebijakan kemanusiaan UE.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa respons terhadap pengungsi Ukraina jauh lebih cepat, terkoordinasi, dan inklusif dibandingkan Palestina. Uni Eropa mengaktifkan *Temporary Protection Directive* (TPD) pada Maret 2022, memberikan akses langsung ke berbagai hak dasar seperti tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Langkah ini diperkuat dengan dukungan finansial dan logistik yang besar melalui lembaga-lembaga UE, mencerminkan adanya *political will* yang kuat. Sebaliknya, respons terhadap Palestina cenderung bersifat tidak langsung, bergantung pada UNRWA, dan rentan terhadap penundaan akibat fragmentasi politik internal UE maupun tekanan eksternal dari Amerika Serikat dan Israel. Hal ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam prioritas dan konsistensi kebijakan kemanusiaan UE.

Selain faktor kebijakan, penelitian ini menegaskan bahwa konstruksi identitas dan representasi media berperan besar dalam membentuk selektivitas. Ukraina sering diposisikan sebagai bagian dari “keluarga Eropa” karena kedekatan geografis, budaya, dan nilai politik yang serupa dengan UE. Sebaliknya, Palestina

lebih sering dipandang sebagai pihak luar atau sumber ancaman, sehingga empati publik dan legitimasi dukungan menjadi lebih lemah. Media arus utama turut memperkuat perbedaan ini, dengan membingkai Ukraina melalui narasi humanis, sementara Palestina lebih sering direpresentasikan dalam kerangka konflik dan kekerasan. Dengan demikian, selektivitas bantuan kemanusiaan tidak hanya dipengaruhi faktor geopolitik, tetapi juga diproduksi melalui wacana sosial dan representasi publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *selective humanitarianism* Uni Eropa lahir dari interaksi kompleks antara kepentingan strategis, konstruksi identitas, dan legitimasi diskursif. Bantuan kemanusiaan terbukti tidak semata ditentukan oleh kebutuhan objektif, melainkan sangat dipengaruhi faktor non-material yang memperkuat bias dan selektivitas. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat argumentasi konstruktivis bahwa identitas dan norma membentuk kepentingan serta tindakan aktor internasional. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi agar UE menegakkan prinsip kemanusiaan secara konsisten tanpa bias politik maupun identitas agar kredibilitas normatifnya tetap terjaga. Selain itu, temuan ini juga relevan bagi negara lain, termasuk Indonesia, untuk merumuskan strategi diplomasi kemanusiaan yang lebih peka terhadap faktor sosial, identitas, dan diskursus global.

Dengan demikian, praktik *selective humanitarianism* Uni Eropa dapat dipahami sebagai hasil dari kombinasi faktor identitas, geopolitik, dan wacana publik. Ukraina diposisikan sebagai bagian dari *keluarga Eropa* yang memiliki kesamaan sejarah, nilai demokratis, dan kedekatan geografis, sehingga memunculkan empati publik dan legitimasi politik yang mendorong aktivasi TPD serta dukungan kebijakan besar-besaran. Sebaliknya, Palestina ditempatkan dalam kerangka "the other" yang sarat dengan citra kekerasan dan instabilitas, sehingga respons UE lebih terbatas pada bantuan teknis melalui UNRWA tanpa perlindungan kolektif yang setara.

Selain itu, faktor geopolitik memperkuat perbedaan ini. Ukraina menjadi prioritas strategis karena posisinya sebagai buffer zone dalam konflik dengan Rusia, sementara isu Palestina terikat pada sensitivitas hubungan dengan Israel dan

Amerika Serikat yang membatasi ruang gerak UE. Narasi media dan opini publik juga berkontribusi, dengan framing pro-Ukraina yang menimbulkan selective empathy, berbanding terbalik dengan framing Palestina yang berorientasi pada isu keamanan. Faktor-faktor tersebut memperlihatkan bahwa selektivitas bukan sekadar respons ad hoc, melainkan bagian dari pola konsisten yang menegaskan kontradiksi antara klaim normatif UE dengan praktik kebijakan kemanusiaannya.

